



## Pengadaan Komputer untuk SMP

# Disdik Usulkan Anggaran Rp 1,2 Miliar

Gianyar (Bali Post) -

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di Kabupaten Gianyar belum maksimal. Hal ini mengingat sejumlah SMP yang menggelar UNBK masih meminjam fasilitas terutama komputer ke sekolah lain. Terkait kondisi tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gianyar mengusulkan anggaran Rp 1,2 miliar untuk pengadaan fasilitas UNBK tahun depan.

Kadisdik Gianyar Made Suradnya, Senin (8/5) kemarin, mengatakan sebenarnya Disdik sudah mengusulkan anggaran pengadaan komputer. Namun, usulan itu tidak diakomodir di APBD 2017. "Sudah kita usulkan, tapi tidak lolos. Kita akan berupaya mengusulkan lagi pada APBD Perubahan tahun ini," katanya.

Diungkapkannya, ada empat sekolah yang membutuhkan bantuan komputer untuk

pelaksanaan UNBK. Sekolah dimaksud yakni SMPN 1 Sukawati, SMPN 1 Ubud, SMPN 1 Tegallalang, dan SMPN 1 Tampaksiring. Namun, untuk bantuan komputer di APBD Perubahan 2017, kemungkinan tidak semua sekolah itu akan mendapatkannya.

"Ya tentu tidak bisa sekalian seluruhnya. Mungkin dari empat sekolah ini kita pilih satu atau dua dulu pada anggaran perubahan tahun ini," ucapnya.

Suradnya mengaku optimis pengadaan komputer bisa terealisasi di APBD Perubahan 2017. Hal ini mengingat pengalaman sebelumnya, pengadaan komputer untuk SMPN 1 Blahbatuh dan SMPN 1 Payangan dianggarkan di APBD Perubahan 2016. "Ya kita tetap menunggu kebijakan pimpinan. Kita hanya mengusulkan," ujarnya.

Diungkapkannya lebih lanjut, pengadaan 100 unit komputer untuk satu sekolah membutuhkan anggaran Rp 1,2 miliar. Anggaran tersebut juga termasuk pengadaan sejumlah alat penunjang UNBK. "Nilai pengadaan komputer ini memang cukup besar. Makanya untuk memenuhi ini hanya bisa dilakukan secara bertahap," tegasnya.

Untuk diketahui, terdapat berbagai kendala dalam pe-

nyelenggaraan UNBK tingkat SMP di Gianyar. SMPN 1 Sukawati terpaksa meminjam tempat di SMAN 1 Sukawati karena kekurangan komputer. Kepala SMPN 1 Sukawati Drs. Komang Jati, S.Pd., M.Pd., M.M. belum lama ini mengatakan, siswanya yang mengikuti UNBK sebanyak 272 orang. Namun jumlah komputer hanya 40 unit. Itu pun yang aktif hanya 35 unit.

Selain meminjam tempat dan komputer, pihaknya juga harus menyewa genset cadangan dengan harga Rp 1,5 juta per hari atau Rp 6 juta untuk empat kali pelaksanaan UN. Pihaknya pun berharap Pemkab Gianyar bisa mengalokasikan anggaran pengadaan komputer agar ke depan pelaksanaan UNBK bisa lebih maksimal. (kmb35)

Edisi : Selasa 9 Mei 2017

Hal : 9





# Bupati Batasi Hibah Dana Bansos

Denpasar (Bali Post) -

Memasuki triwulan kedua, realisasi pembangunan fisik belum sepenuhnya berjalan. Bahkan terkesan sangat minim. Belum lagi sejumlah tender belum rampung. Menyikapi hal ini, jajaran Komisi III DPRD Denpasar mulai bersikap karena khawatir akan banyak rencana pembangunan tidak akan terealisasi di tahun ini.

Dihubungi Senin (8/5) kemarin, Ketua Komisi III DPRD Denpasar Eko Supriadi mengatakan, pihaknya sudah menyusun jadwal untuk mengundang instansi terkait, seperti Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar dan Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR). "Paling tidak kami akan undang instansi ini pada Kamis (18/5) atau Jumat (20/5) mendatang," katanya.

Menurut Eko Supriadi, pihaknya sudah sempat mengama-

ti progres realisasi fisik pada tahun ini relatif sedikit. Padahal banyak program yang sudah disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk rencana pembangunan gedung Pasar Badung juga belum bisa dilakukan karena persoalan tender. "Ini yang akan kami ingin tahu, apa sesungguhnya persoalan yang mereka hadapi. Kami khawatir ini akan terlambat semua," ujar politisi PDI-P ini.

Anggota Komisi III lainnya, sep-

erti Wayan Suadi Putra dan A.A. Susruta Ngurah Putra juga mempertanyakan realisasi proyek yang belum maksimal. Kedua wakil rakyat ini khawatir akan terjadi keterlambatan pengerjaan karena sudah hampir pertengahan tahun. "Saya sejak lama sudah katakan, sangat pisimis bila proyek sebesar Pasar Badung bisa rampung tahun ini," sindir Susruta.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar Ir. Maria Antonia Dezire Mulyani, M.Si. mengatakan, pengumuman pemenang tender proyek pembangunan gedung Pasar Badung ditunda yang sedianya digelar Rabu (3/5) lalu.

Ditemui terpisah, Kasubag Pembinaan dan Perencanaan Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa Setda Kota Denpasar I Ketut Suastina, S.Ip., M.Kes. mengatakan, hingga Maret 2017 jumlah pekerjaan yang memasuki proses lelang mencapai 32 unit. Terdiri dari konstruksi sembilan paket, konsultan 15 paket dan pengadaan barang delapan paket. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah karena untuk periode satu tahun anggaran masih banyak waktu. "Saya kira lelang-lelang berikutnya masih banyak. Namun pada awal tahun ini kami sedikit rem, karena konsentrasi untuk proses lelang proyek Pasar Badung. Karena nilainya cukup besar, maka prosesnya lebih panjang," katanya.

Dari 32 paket pekerjaan yang masuk tersebut, kata Suastina pagu yang dipatok mencapai Rp 300 miliar lebih. Hanya ketika

proses lelang sudah rampung, maka bisa terjadi penurunan realisasi (efisiensi) dari pagu yang ditetapkan. Dari semua paket yang masuk lelang, pembangunan gedung Pasar Badung yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Denpasar ini nilai pagunya paling besar. Paket konstruksi ini nilai pagu paketnya mencapai Rp 204.440.181.300. Sedangkan untuk nilai HPS paket dipatok Rp 159.182.085.000. Sumber dana yang digunakan, yakni APBN dan APBD 2017. (kmb12)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Senin, 9 Mei 2017

Hal : \_\_\_\_\_





Kasus Dugaan Korupsi Perdin

## Besok, Mantan Sekwan Diadili

**SETELAH** dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Ketua PN Denpasar sudah menunjuk majelis hakim tipikor yang bakal menyidangkan perkara dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) di DPRD Denpasar. Sedangkan sidang dengan terdakwa mantan Sekwan DPRD Denpasar

Gusti Rai Suta akan disidang Rabu (10/5) besok.

Sebagai ketua majelis ditunjuk hakim senior Wayan Sukanila. Menurutnya, sidang akan diawali dengan pembacaan dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam persidangan nanti, Sukanila akan didampingi ha-

kim Sutrisno dan Nurbayah Gaol.

Sementara dalam perkara ini terdakwa Rai Suta sebelumnya akan menghadapi sendiri kasusnya. Dia tidak akan didampingi pengacara. Namun, karena tuntutan hukumannya di atas lima tahun, hakim atau negara wajib mencarikan yang bersangkutan

pembela hukum. Biasanya dilakukan penunjukan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan korupsi pada perdin DPRD Denpasar tahun 2013, dengan melibatkan dua travel yakni Bali Daksina dan Sunda Duta. Pihak DPRD kemudian mengembalikan keru-

gian negara hingga Rp 2,293 miliar lebih. Inilah yang sempat menjadi sorotan mantan kuasa hukum terdakwa. Pasalnya, Rai Suta disebut dikorbankan, padahal sudah ada yang mengaku hingga mengembalikan kerugian negara. Mantan kuasa hukumnya saat itu minta kejaksaan untuk mengusutnya. (asa)

Edisi : Selasa, 9 Mei 2017

Hal : 5